e-ISSN 2775-8869
p-ISSN 2776-0243
Prabayaksa: Journal of History Education
Volume 5, Nomor 2, September 2025; hh. 11-18

PERGOLAKAN POLITIK ANTARA PEMERINTAH SIPIL DAN TNI AD DI INDONESIA PADA MASA PEMERINTAHAN PRESIDEN SOEKARNO

Ilham Galih Pambudi[1], Octavian Hendra Priyatno[2], Fitri Mardiana[3], Dewicca Fatma Nadilla[4]
[1,2,3,4]Jurusan Pendidikan Sejarah, Universitas Lambung Mangkurat
Email Korespondensi: ilhamgalih45@ulm.ac.id

Diterima: 25 Agustus 2025 Direvisi: 10 September 2025 Disetujui: 10 September 2025

ABSTRACT

The army is one of the dimensions of the TNI that is actively involved in civil administration. Disagreements between army leaders and civilian government regarding authority and command have been a persistent source of tension between civil groups and the military. The purpose of this study is to examine: 1) The July 3rd, 1946 Incident, 2) The October 17th, 1952 Incident, and 3) The Charter on the Integrity of the Army. This research employs critical historical methods. The research process begins with topic selection as an initial activity to determine the problem to be examined. The second phase involves collecting sources from archives, newspapers, and books. These sources were obtained from various locations including the National Archives of the Republic of Indonesia, UNY Library, Jogja Library Center, and the National Library. The third phase is verification, also called source criticism, to ensure the validity of the sources. The fourth phase is interpretation, which involves analyzing the sources. The fifth phase is historiography, which presents the research results. This research demonstrates that: (1) The Army (AD) had strong supporting factors for political involvement since the Proclamation of August 17, 1945; (2) The July 3rd, 1946 Incident and the October 17th, 1952 Incident indicate that relations between civilian and military groups were strained; (3) The Army Charter became a symbol of reunification following internal divisions within the Army.

Keywords: *The Army, Politics, Indonesia, The Army Charter*

PENDAHULUAN

Penulisan artikel ini dilatarbelakangi dengan adannya peristiwa demontrasi di berbagai wilayah di Indonesia pada bulan Agustus-September 2025 akhir-akhir ini. Dampak adanya demonstrasi tersebut memunculkan adanya isu darurat militer di Indonesia dari media-media sosial. Darurat militer adalah fenomena ketika pihak militer mengambil alih kekuasaan pemerintah sipil, karena pemerintah sipil dianggap tidak mampu menjalankan roda pemerintahan negara. Ternyata masuknya golongan militer di pemerintah sipil dalam sejarah perjalanan tegak berdirinya NKRI pernah terjadi yaitu ketika pada masa pemerintahan Orde Baru. Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto tersebut muncul istilah Dwi Fungsi ABRI. Dimana pada masa Orde Baru tersebut seorang anggota TNI bisa menjabat gubernur ataupun tempat pemerintah sipil lainnya meskipun masih menjadi anggota TNI aktif. Sebelum adanya Dwi Fungsi ABRI pada masa Orde Baru, golongan militer (khususnya TNI AD) pernah beberapa kali juga terjadi peristiwa bersitegang dengan pemerintah sipil, dimana TNI AD ingin ikut serta dalam menjalankan rode pemerintahan negara, dan tidak ingin hanya sekedar menjadi alat kelengkapan negara. Hal itu terjadi sejak awal kemerdekaan atau masa pemerintahan Presiden Soekarno.

Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Kemerdekaan tersebut diperoleh dari hasil perjuangan sendiri (M. Ricklefs, 2007). Dalam memperoleh kemerdekaannya bangsa Indonesia berjuang melalui 2 jalan yaitu mengangkat senjata dan diplomasi. Perjuangan dengan mengangkat senjata ini militer memiliki fungsi yang sangat besar, terutama pasca proklamasi baik ketika menghadapi Sekutu seperti Peristiwa 10

Prabayaksa: Journal of History Education
Volume 5, Nomor 2, September 2025

November, Peristiwa Medan Area, Peristiwa Bandung Lautan Api, Peristiwa Palagan Ambarawa, dan lain sebagainya di seluruh wilayah Indonesia serta agresi militer Belanda (Agresi militer Belanda I dan II) yang ingin kembali merebut Indonesia maupun menghadapi ancaman disintegrasi bangsa.

Keadaan awal kemerdekaan yang penuh dengan ancaman fisik dari luar tersebut mengakibatkan golongan militer dari bekas PETA, KNIL, Heiho, dan lain sebagainya harus menjadi ujung tombak pertahanan, sehingga mereka (militer) menghendaki agar segera dibentuk tentara nasional di bulan Agustus 1945 pasca proklamasi kemerdekaan. Permasalahan muncul ketika golongan sipil (pemerintah) tidak memenuhi permintaan golongan militer tersebut. Pemerintah hanya membentuk badan keamanan, yaitu Badan Keamanan Rakyat (Soebijono, 1997). Salah satu alasan kenapa pemerintah sipil tidak segera membentuk tentara nasional adalah karena menurut pandangan golongan sipil, kekuatan fisik atau militer Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 masih belum kuat, sehingga apabila segera dibentuk tentara nasional, mereka (golongan sipil) khawatir hal itu menjadi tanda bahwa Indonesia menentang kekuatan militer luar sat aitu yang jauh lebih besar dan akan menimbulkan peperangan yang memakan korban lebih besar lagi. Dari pertimbangan itu maka tanggal 22 Agustus 1945 dibentuklah Badan Keamanan Rakyat (BKR), dan bukan tentara nasional.

Pada tanggal 5 Oktober 1945 akhirnya pemerintah (golongan sipil) melaksanakna perubahan yaitu BKR diubah organisasinya menjadi tentara, yang diberi nama Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Dikemudian hari TKR berubah Namanya menjadi Tentara Keselamatan Rakyat pada tanggal 7 Januari 1946. Pada tanggal 26 Januari 1946 nama TKR diubah kembali menjadi TRI (Tentara Republik Indonesia), dan yang terakhir adalah berdasarkan keputusan presiden pada tangga 3 Juni 1947 TRI diubah Namanya menjadi TNI (Tentara Nasional Indonesia) hingga sekarang.

Perselisihan masalah pembentukan angkatan perang negara antara pemerintah dengan golongan militer ini menimbulkan gejolak yang panjang dikemudian hari, terlebih ketika strategi pemerintah yang dijalankan dalam menghadapi serangan Belanda dianggap golongan militer merugikan negara, seperti hasil perjanjian Renville. Pertentangan ini mendorong militer (Angkatan Darat) untuk masuk ke politik, sehingga muncul beragai peristiwa seperti Peristiwa 3 Juli 1949, Peristiwa 17 Oktober, Piagam keutuhan Angkatan Darat , pergolakan daerah luar Jawa yang menuntut keadilan dan pemerataan pembangunan dari pemerintah pusat di Jakarta (Jawa). Dikeluarkan Piagam Keutuhan Angkatan Darat karena pimpinan TNI AD terpecah akibat dari peristiwa 17 Oktober 1952 dan pemerintah sepertinya tidak mampu menyelesaikan masalah yang terjadi di dalam tubuh TNI AD (Muhaimin, 1982). Peristiwa 17 Oktober menurut Salim Said merupakan konflik terbuka pertama antara militer dengan pemerintah sipil pasca kemerdekaan (Adam, 2007)

Pergolakan daerah yang terus menjadi-jadi antara tahun 1956-1957 membuat pemerintah jatuh bangun dengan kabinet yang sering berganti. Pada akhir tahun 1956 Presiden mencanangkan sistem Demokrasi Terpimpin. Suatu sistem yang diambil dari gagasan pribadi Presiden Sukarno dan dijalankan bersama-sama dengan pimpinan TNI AD (Hananto, 2008). Munculnya Demokrasi Terpimpin tersebut sekaligus menandai mundurnya Bung Hatta dari kursi Wakil Presiden karena perbedaan politik dengan Presiden Sukarno.

Mundurnya Bung Hatta dari kursi wakil presiden, dimana Bung Hatta sendiri berasal dari Sumatera yang notabene luar Jawa membuat keadaan politik di Indonesia pada masa itu semakin tidak stabil. Tuntutan dari luar Jawa kepada pemerintah pusat di Jawa agar dikembalikannya Dwitunggal Sukarno-Hatta dengan tindakan penyelundupan barang-barang secara ilegal serta pernyataan pemutusan hubungan dengan pemerintah pusat dari komandan-komandan daerah luar Jawa, membuat semakin memburuknya hubungan antara pemerintah pusat (golongan sipil) dengan golongan militer, terutama yang berada di luar Jawa (Arsip Nasional Republik Indonesia, 1955)

Pemecahan masalah dalam penelitian ini ditujukan untuk mengetahui peristiwa-peristiwa besar yang berisi keterlibatan golongan militer (khsusunya TNI AD) dalam urusan kebijakan pemerintahan sipil di Indonesia selama masa pemerintahan Presiden Soekarno. Dengan dirumuskannya tujuan penelitian yang isinya adalah (1) Untuk mengetahui kronologi peristiwa 3 Juli 1946; (2) Untuk mengetahui peristiwa 17 Oktober 1952; (3) Untuk mengetahui peristiwa dikeluarkannya piagam keutuhan angkatan darat. Harapan dari adanya penulisan ini adalah semakin menambah keilmuan dan pengetahuan khususnya tentang latar belakang militer bisa duduk di kursi politik dan mengapa bisa munculnya Dwi Fungsi ABRI dikemudian hari yaitu pada masa pemerintahan Presiden Soeharto (Masa Orde Baru), serta bisa menanggapi dengan bijak ketika munculnya beberapa fenomena yang ada kaitannya dengan golongan militer dan golongan sipil dalam pemerintahan yang terjadi dewasa ini atau di masa-masa yang akan datang.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode sejarah atau metode penelitian historis. Metode sejarah mempunyai pengertian yaitu suatu kumpulan yang sistematis dari prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang dimaksudkan untuk membentuk dan secara efektif akan mengkaji sumber-sumber itu secara kritis dan menyajikan suatu hasil sintesa (pada umumnya dalam bentuk tertulis) dari hasil-hasil yang dicapai. Kuntowijoyo mengartikan metode sejarah sebagai petunjuk pelaksanakan dan teknis tentang bahan, kritik, dan interpretasi sejarah serta penyajian dalam bentuk tulisan (Kuntowijoyo, 1999).

Tahap penelitian diawali dengan pemilihan topik yang merupakan kegiatan awal untuk menentukan permasalahan yang akan dikaji. Tahap kedua adalah pengumpulan sumber baik dari arsip, koran, maupun buku-buku. Sumber-sumber tersebut didapat dari berbagai tempat diantaranya Arsip Nasional Republik Indonesia, Perpustakaan UNY, Jogja Library Center, dan Perpustakaan Nasional. Tahap ketiga adalah verifikasi yang disebut juga kritik sejarah untuk memastikan bahwa sumber tersebut sudah valid. Verifikasi dilakukan dengan 2 tahap yaitu kritik interen dan kritik ekstern. Kritik intern dilakukan dengan meninjau isi dari dokumen yang didapat, sedangkan kritik ekstern dilakukan dengan meninjau dari segi fisik dokumen. Tahap keempat adalah interpretasi yang merupakan tahap penafsiran. Tahap penafsiran ini dilakukan sebagai upaya untuk memahami makna dari peristiwa sejarah dengan menghubungkan berbagai fakta yang ditemukan, dan mencari hubungan sebab akibat. Tahap kelima adalah penulisan sejarah atau historiografi sebagai tahap akhir penelitian.

Prabayaksa: Journal of History Education
Volume 5, Nomor 2, September 2025

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam perjalanan pemerintahan Presiden Soekarno di Indonesia yang telah berlangsung selama lebih dari 20 tahun, sudah memunculkan berbagai peristiwa yang berisi perselisihan antara golongan militer (TNI AD) dengan pemerintah sipil. Perselisihan tersebut tidak hanya berlangsung satu atau dua kali, namun terjadi lebih. Dua hal utama yang menyebabkan terjadinya perseteruan antara kedua golongan tersebut adalah yang pertama bahwa kemerdekaan Indonesia didapat bukan sebuah hadiah dari negara tertentu, teapi hasil jerih payah bangsa Indonesia yang tentunya jerih payah tersebut harus disokong dengan berbagai pertempuran untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan dari negara-negara yang tidak rela Indonesia merdeka, sehingga jasa dari pihak militer terutama TNI AD begutu besar. Latar belakang tersebut membuat TNI AD tidak ingin hanya menjadi alat kelengkapan negara. Hal yang kedua adalah ketidakpuasan pihak TNI AD terhadap beberapa kebijakan yang dikeluarkan pemerintah sipil untuk menjalankan roda pemerintahan saat itu. Dari hal tersebut akan dibahas 3 peristiwa besar yang melibatkan TNI AD dan pemerintah sipil pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, yaitu Peristiwa 3 Juli 1946, Peristiwa 17 Oktober 1952, dan Piagam Keutuhan Angkatan Darat.

1. Peristiwa 3 Juli 1946

   Indonesia memproklamasikan kemerdekaan disaat terjadi kekosongan kekuasaan, hal itu membuat Sekutu sebagai pemenang Perang Dunia II marah dan memerintahkan Belanda untuk menangkap Presiden dan Wakil Presiden Indonesia yaitu Sukarno-Hatta. Kemarahan Sekutu terebut menimbulkan peperangan antara Indoensia dengan Sekutu dan Belanda sehingga ibu kota RI di Jakarta pindah ke Jogjakarta dan muncul sebutan Republik Jogja (Wiharyanto, 2011).

   Keadaan yang mencekam dan membahayakan Sukarno-Hatta tersebut memunculkan perebutan pewaris kekuasaan jika Sukarno tertangkap atau meninggal. Perebutan kekuasaan itu terjadi antara Tan Malaka dengan Syahrir. Adanya persaingan tersebut membuat Presiden Sukarno mengubah system pemerintahan yang awalnya presidentil atau presidensial, menjadi sistem pemerintahan parlementer dengan menunjuk Syahrir sebagai Perdana Menteri (Sunarso, 2006). Penunjukkan Syahrir tersebut tidak serta merta perhatian Presiden Soekarno hanya ke Syahrir, tetapi juga ke Tan Malaka (Adam, 2007). Ditunjuknya Syahrirsebagai Perdana Menteri ini dikarenakan strategi politik Syahrir sama dengan Presiden Sukarno yaitu diplomasi, sedangkan strategi Tan Malaka sangat berbeda dengan Presiden Sukarno yaitu lebih mengutamakan perjuangan fisik dengan jalan peperangan. Strategi politik Tan Malaka ini diam-diam mendapat simpati dari militer pimpinan Jenderal Sudirman, hal inilah yang mengindikasikan bahwa militer dalam hal ini khususnya TNI AD mulai masuk politik.

   Ditunjuknya Syahrir sebagai Perdana Menteri yang mengutamakan diplomasi dalam menghadapi Belanda, membuat Tan Malaka tidak senang. Tan Malaka dengan kelompoknya yang tergabung dalam Persatuan Perjuangan akhirnya berhasil menjatuhkan Syahrir. Tan Malaka kemudian ditunjuk Presiden untuk membentuk cabinet, namun tidak mampu. Syahrir akhirnya ditunjuk Presiden kembali untuk membentuk cabinet dan berhasil menjadi Perdana Menteri yang kedua kalinya (Rusdy Hoesen, 2010). Terpilihnya Syahrir sebagai Perdana Menteri yang kedua ini membuat Tan Malaka bersama PP-nya semakin

tidak suka sehingga pada tanggal 17 Maret 1946 PP melakukan *rally* besar-besaran di Madiun, namun dapat ditumpas oleh pemerintah.

Tindakan Tan Malaka di Madiun yang berhasil ditumpas tersebut tidak berakhir begitu saja. Pada tanggal 3 Juli 1946 datang utusan kepada Presiden untuk mengajukan petisi yang intinya agar Presiden menyetujui pembentukan Dewan Politik Tertingi dengan Tan Malaka ketuanya dan menyerahkan seluruh kekuatan Angkatan Peran dibawah Jenderal Sudirman. Petisi tersebut ditolak dan semua yang terlibat dalam peristiwa 3 Juli 1946 serta pimpinan PP termasuk Tan Malaka ditangkap pemerintah. Sejak saat itu Tan Malaka dan PP-nya menjadi lumpuh dan peristiwa 3 Juli 1946 gagal.

2. Peristiwa 17 Oktober 1952

Pada masa Demokrasi Parlementer lebih tepatnya masa Kabinet Wilopo. Kabinet ini berlangsung sejak bulan April 1952-Juni 1953, yang dipimpin oleh Mr. Wilopo (Aman, 2013). Diberlakukan kebijakan penghematan anggaran belanja oleh pemerintah. Penghematan tersebut juga termasuk pada anggaran belanja TNI, sehingga di dalam TNI harus dilakukan demobilisasi dan rasionalisasi yang membuat prajurit TNI harus dikurangi jumlahnya dan ditingkatkan kemampuannya. Kebijakan tersebut menimbulkan pro dan kontra dalam TNI sendiri.

Bulan Juli 1952 muncul permintaan dari Kolonel Bambang Supeno agar KSAD yang saat itu dijabat Kolonel A.H. Nasution diganti. Permintaan Kolonel Bambang Supeno tersebut ditolak. Hal tersebut membuat Kolonel Bambang Supeno mengirimkan surat kepada menteri pertahanan dan parlemen omisi pertahananyang isinya dia sudah tidak menaruh kepercayaan lagi kepada atasannya. Akibat dari perbuatan itu maka Kolonel Bambang Supeno diberhentikan dari tugasnya oleh KSAD. Setelah itu KSAD beserta menteri pertahanan dan KSAP menghadap Presiden untuk membahas masalah tersebut, namun Presiden tidak menyetujui dan tidak mau menandatangani keputusan pemberhentian Kolonel Bambang Supeno (Abdul Haris Nasution, 2013).

Surat dari Kolonel Bambang Supeno tersebut menjadi bahasan di parlemen, sehingga parlemen melakukan beberapa sidang untuk membahasnya. Dari berbagai rapat di parlemen muncul beberapa mosi yang ditujukan kepada TNI dan kementerian pertahanan. Salah satu mosi yang diterima adalah mosi Manai Sophian yang isinya agar diadakan reorganisasi struktur pimpinan kementerian pertahanan dan kemiliteran. Melihat kaum politisi yang sudah mencampuri urusan intern TNI dengan diterimanya mosi Manai Sopian bahkan hingga masalah penggantian pimpinan TNI, maka TNI (Khususnya TNI AD) dibawah pimpinan KSAD Kolonel A.H. Nasution melakukan demonstrasi besar-besaran yang mengejutkan Jakarta pada tanggal 17 Oktober 1952.

Demonstrasi yang mengerahkan lebih dari 30.000 demonstran dengan artileri militer yang diarahkan ke Istana Merdeka itu meminta kepada Presiden agar DPRS saat itu dibubarkan dan segera diadakannya pemilihan umum. Akan tetapi Presiden tidak dapat memenuhi semua permintaan demonstran. Presiden tidak bias membubarkan DPRS karena hal itu akan membuatnya menjadi dictator. Presiden berjanji akan segera mengadakan pemilihan umum dan meminta demonstran segera bubar dengan tenang. Usai membubarkan demonstran Presiden menghadap KSAD dan beberapa pimpinan TNI yang menjadi penggerak demonstrasi tersebut.

Prabayaksa: Journal of History Education
Volume 5, Nomor 2, September 2025

Dalam *Arsip Nasional Republik Indonesia* tentang Surat edaran dari SUAD perihal sekitar peristiwa 17 Oktober 1952 yang ditulis pada tanggal 24 November 1952 dan tertanda tangan atas nama KSAD Kolonel A.H. Nasution dituliskan bahwa KSAD Kolonel A.H. Nasution beserta pimpinan TNI menyatakn kepada Presiden bahwa DPRS yang saat ini sudah tidak representative dan meminta agar dibubarkan. Namun Presiden tetap tidak bisa membubarkannya. Kolonel A.H. Nasution pasca kejadian itu mengundurkan diri dari jabatan KSAD sebagai bentuk pertanggungjawabannya (Arsip Nasional Republik Indonesia, 1952). Sejak saat itu peristiwa 17 Oktober 1952 dapat dikatakan tidak berhasil, dan gagallah manuver politik pertama kali yang dilancarkan TNI AD terhadap pemerintah.

3. Piagam Keutuhan Angkatan Darat 1958

Dalam tulisan Koran Kedaulatan Rakyat yang berjudul *Kol. Bambang Sugeng tolak djabatan KSAD* yang diterbitkan tanggal 11 Desember 1952 dituliskan bahwa pasca peristiwa 17 Oktober 1952 pimpinan TNI AD pecah menjadi dua yaitu yang pro peristiwa 17 Oktober dan yang kontra peristiwa 17 Oktober. KSAD Kolonel A.H. Nasution yang mengundurkan diri kemudian digantikan oleh Kolonel Bambang Sugeng. Pengangkatan Kolonel Bambang Sugeng ini tidaklah berjalan mulus, Kolonel Bambang Sugeng pernah menolak jabatan KSAD tersebut karena wakil KSAD Letkol. Sutoko dipindahkan oleh pemerintah dari Jakarta ke daerah (Rakyat, 1952).

Dalam tulisan di Koran Kedaulatan Rakyat yang berjudul *Rapat Perwira AD dibuka*, terbit tanggal 17 Februari 1955 dituliskan bahwa pengangkatan Kolonel Bambang Sugeng sebagai KSAD membuat suatu permasalahan baru, yaitu permasalahan antara Kolonel Bambang Sugeng dengan Menteri Pertahanan Sri Sultan Hamengkubuwono IX, sebab antara KSAD yang baru tersebut dengan Menteri Pertahanan terdapat perbedaan yang besar dalam menyelesaikan masalah intern TNI AD. Sejak Kolonel Bambang Sugeng menjabat KSAD akhir tahun 1952 masalah intern TNI AD akibat peristiwa 17 Oktober tidak pernah selesai. Pada tanggal 17 Februari 1955 diadakan pertemuan para perwira TNI AD baik yang pro maupun kontra dengan peristiwa 17 Oktober, di Yogyakarta. Pertemuan perwira Angkatan Darat di Yogyakarta tersebut dimulai pukul 08.00 WIB tanggal 17 Februari 1955 bertempat di Gedung Negara/ Gedung Agung (Rakyat, 1955b).

Dalam tulisan di Koran Kedaulatan Rakyat dengan judul *Djanji Para Perwira mengikuti djadjak pengorbanan Pahlawan* yang diterbitkan tanggal 26 Februari 1955, dituliskan bahwa dalam pertemuan di Yogyakarta tersebut dibahas mengenai usaha mempersatukan kembali keretakan di dalam tubuh TNI AD selama ini. Pertemuan tersebut berlangsung hingga tanggal 25 Februari 1955 dan menghasilkan Piagam Keutuhan Angkatan Darat atau Piagam Yogya yang berisi tidak diperkenankan golongan sipil ikut campur urusan intern TNI AD terlebih lagi soal pengangkatan dan pergantian pimpinan, persatuan dikalangan perwira TNI AD yang selama ini pecah, serta berjanji dan mengucapkan sumpah setia akan tetap bersatu di makam almarhum Jenderal Sudirman dan almarhum Letjen. Urip Sumoharjo. Di bawah hujan rintik-rintik para perwira yang sedang mengadakan pertemuan di Jogja, pergi kemarin pagi berziarah ke Makam Pahlawan Semaki, meletakkan karangan bunga diatas makam-makam Jenderal Sudirman dan Letnan Jenderal Urip Sumoharjo, berturut-turut oleh Ibu Sudirman dan Ibu Urip Sumoharjo sertaoleh KSAD dan Jenderal Mayor Simatupang sebagai perwira senior yang tertua (Rakyat, 1955a).

Ketiga peristiwa yang sudah dipaparkan di atas didapatkan temuan penting yang menunjukkan bahwa pada masa pemerintahan Orde Lama atau pemerintahan Presiden Soekarno telah muncul ketidakpuasan dari golongan militer (TNI AD) terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah sipil dalam menjalankan roda pemerintahan. Sikap bersitegang tersebut dimulai dari sebuah petisi yang menginginkan seluruh kekuatan angkatan perang yang dimiliki Republik Indonesia diserahkan kepada Jenderal Soedirman, padahal seluruh kekuatan Angkatan perang sebelumnya dibawah kendali Presiden Soekarno sebagai panglima tertinggi angkatan perang. Tidak hanya dalam hal adu pemikiran, namun ketegangan tersebut terjadi sampai tahap tindakan-tindakan yang mengarah pada perseteruan fisik, seperti ketika tank-tank milik TNI AD dikerahkan untuk mengepung istana kepresidenan dan mengarahkan moncong meriam ke bangunan istana tersebut dalam peristiwa 17 Oktober 1952. Dalam suasana tegang antara TNI AD dan pemerintah sipil tersebut, muncul perpecahan dalam tubuh TNI AD sendiri, yaitu antara para pimpinan TNI AD yang pro dengan pemerintah sipil dengan para pimpinan TNI AD yang kontra dengan pemerintah sipil. Dalam suasana perpecahan tersebut maka diadakanlah pertemuan di Yogyakarta untuk menyatukan kembali para pimpinan TNI AD, sehingga muncullah Piagam Keutuhan Angkatan Darat pada tahun 1955.

SIMPULAN

Dari temuan-temuan lapangan di atas didapatkan jawaban bahwa peristiwa proklamasi kemerdekaan republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan hasil jerih payah sendiri bangsa Indonesia, bukan hadiah dari negara Jepang. Belanda yang tidak terima dengan merdekanya Indonesia membuat berbagai usaha untuk bisa kembali menjajah, sehingga banyak pertempuran antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda yang didukung Sekutu. Peristiwa tersebut memunculkan istilah masa perang mempertahankan kemerdekaan yang berlangsung selama hampir 5 tahun pasca Indonesia merdeka. Terjadinya banyak pertempuran dalam rangka usaha mempertahankan kemerdekaan ini membuat militer dalam hal ini khususnya angkatan darat menjadi tulang punggung dan berperan sangat besar.

Pertempuran untuk mempertahankan kemerdekaan ditambah dengan ketidakcocokan dalam beberapa keputusan yang dikeluarkan pemerintah sipil Indonesia, membuat Angkatan Darat (TNI AD) ingin ikut masuk dalam kendali pemerintahan. TNI AD tidak ingin hanya sebagai alat negara yang dikendalikan oleh orang-orang sipil. Konflik antara sipil dengan TNI AD menjadi pendorong bagi TNI AD untuk masuk politik, baik karena sikap golongan sipil yang kurang harmonis kepada TNI AD, maupun sikap golongan sipil dalam menghadapi musuh yang mengancam kedaulatan RI dirasa oleh para perwira TNI AD tidak efektif dan merugikan bangsa. Keadaan tersebut membuat munculnya beberapa peristiwa besar selama masa pemerintahan presiden Soekarno, antara lain Peristiwa 3 Juli 1946, Peristiwa 17 Oktober 1952. Peristiwa 17 Oktober 1952 tersebut tidak hanya menjadi penanda bahwa hubungan antara pemerintah sipil dengan TNI AD berada dipuncak ketegangan, namun juga memunculkan perpecahan sendiri antar para petinggi TNI AD yaitu yang pro dan kontra dengan adanya peristiwa 17 Oktober 1952 tersebut. Perpecahan dalam tubuh matra angkatan darat tersebut yang nantinya akan memunculkan Piagam Keutuhan Angkatan Darat, yang bertujuan untuk menyatukan kembali para petinggi TNI AD.

REFERENSI

Arsip Nasional Republik Indonesia. (1952). *Tentang perihal Angkatan Darat dalam peristiwa 17 Oktober 1952*.

Arsip Nasional Republik Indonesia. (1955). *Keputusan Dewan Perjuangan tentang pembentukan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia/PRRI*.

Adam, A. W. (2007). *Seabad kontroversi sejarah*. Ombak.

Aman. (2013). *Sejarah Indonesia masa kemerdekaan*. Pujangga Press.

Hananto, Y. (2008). *Bermuka dua kebijakan Soeharto terhadap Soekarno beserta keluarganya*. Ombak.

Hoesen, R. (2010). *Terobosan Sukarno dalam Perundingan Linggarjati*. Penerbit Buku Kompas.

Koran Rakyat. (1952). Kolonel Bambang Sugeng tolak jabatan KSAD.

Koran Rakyat. (1955a). Djandji para perwira.

Koran Rakyat. (1955b). Rapat perwira AD dibuka.

Kuntowijoyo. (1999). *Pengantar ilmu sejarah*. Yayasan Bentang Budaya.

Muhaimin, Y. A. (1982). *Perkembangan militer dalam politik di Indonesia 1945-1966*. Gadjah Mada University Press.

Nasution, A. H. (2013). *Peristiwa 17 Oktober 1952 ketika "moncong" meriam mengarah ke Istana Merdeka*. Narasi.

Ricklefs, M. C. (2007). *Sejarah Indonesia modern 1200-2004*. Serambi Ilmu Semesta.

Soebijono. (1997). *Dwi fungsi ABRI perkembangan dan peranannya dalam kehidupan politik di Indonesia*. Gadjah Mada University Press.

Sunarso. (2006). *Pendidikan kewarganegaraan PKN untuk perguruan tinggi*. UNY Press.

Wiharyanto, A. K. (2011). *Sejarah Indonesia dari proklamasi sampai pemilu 2009*. Narasi.